

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaturan tanggung jawab negara dalam program asimilasi terhadap narapidana di Indonesia. Program asimilasi merupakan salah satu bentuk rehabilitasi yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana dalam kembali berintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. 2) Bagaimana bentuk formulasi dalam program asimilasi di masa mendatang? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan program asimilasi narapidana di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang program asimilasi narapidana di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Meskipun demikian, dalam prakteknya terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program asimilasi, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan ketidakpastian dalam penanganan kasus narapidana berat. 2) Pada akhirnya, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengaturan tanggung jawab negara dalam program asimilasi terhadap narapidana di Indonesia. Rekomendasi tersebut meliputi perluasan kerjasama antarinstansi terkait, peningkatan pengawasan dan evaluasi program, serta penyediaan sumber daya yang memadai. Diharapkan dengan implementasi rekomendasi ini, program asimilasi narapidana di Indonesia dapat lebih efektif dalam memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan mereka dalam kembali berkontribusi positif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

Kata kunci: Tanggung Jawab Negara, Program Asimilasi, dan Narapidana

STATE RESPONSIBILITY ARRANGEMENT OF ASSIMILATION PROGRAM TOWARD PRISONERS IN INDONESIA

ABSTRACT

The reaserch objective are : 1)To analyze and assess the state's framework for responsibility in the Indonesian prisoner assimilation program. The assimilation program is a type of rehabilitation meant to get people ready to go back into society once they've served their time. 2)The analysis of laws, regulations, and court rulings pertaining to Indonesia's prisoner assimilation program is the primary topic of this research, which uses a normative legal research methodology. The information used in this study came from a literature review that includes gathering and examining pertinent legal resources connected to the research issue. The research's conclusions show 1)that a number of legislation, including the Government Ordinance Number 31 of 1999, Act Number 22 of 2022 concerning Corrections, and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2022, regulate Indonesia's prisoner integration program. However, in reality, there are a number of issues that restrict the integration program's effectiveness, including a lack of interagency collaboration, a lack of funding, and unpredictability in the management of serious prisoner cases. In the end, this research offers suggestions for enhancing the state's framework for accountability in the Indonesian prisoner assimilation program. 2)These suggestions include boosting program supervision and assessment, increasing interagency cooperation, and allocating sufficient resources. It is intended that by putting these suggestions into practice, Indonesia's prisoner integration program will be more successful in giving inmates the chance to get well and get ready to contribute positively to society after completing their terms.

Keywords: *State Responsibility, Assimilation Program, and Prisoner*